

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini semakin kompleks menuntut perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja keuangan, tetapi juga pada pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, transparan, dan berkelanjutan (Fani *et al.*, 2025). Salah satu instrumen yang semakin mendapat perhatian global adalah *Integrated Reporting* (IR) yang resmi digunakan di Indonesia pada tahun 2021 setelah mengalami pengunduran akibat COVID-19 (Pertiwi, 2022). Laporan ini tidak hanya menyajikan informasi keuangan tradisional, tetapi juga mencakup aspek lingkungan, sosial, serta strategi keberlanjutan jangka panjang (Azzahra, 2022).

International Integrated Reporting Council (IIRC) menerbitkan *Integrated Reporting Implementation Framework* pada tahun 2013. Kerangka pelaporan terintegrasi ini merupakan bentuk pelaporan kinerja perusahaan yang bercirikan transparansi serta menggunakan gaya penyajian laporan modern. Tujuan utama dari kerangka tersebut adalah untuk menetapkan prinsip dan elemen yang menjadi pendorong dalam penyusunan seluruh konten dari *integrated reporting* (Prawesti, 2019). Fenomena internasional menunjukkan bahwa sejak diluncurkannya IIRC pada tahun 2013, semakin banyak negara yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi IR sebagai bagian dari praktik *good corporate governance* (Damayanti & Dewayanto,

2023). Misalnya, di Afrika Selatan, Johannesburg Stock Exchange menjadi yang pertama mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan terintegrasi, sehingga menjadikan Afrika Selatan sebagai pionir dalam penerapan IR di tingkat global (Dilling & Caykoylu, 2019).

Di Indonesia sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan perusahaan keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip IR. Hal ini terutama penting bagi perusahaan keuangan seperti perbankan dan asuransi yang memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian (Suwarno *et al.*, 2025). Data dari OJK tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor keuangan menyumbang lebih dari 45% kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, implementasi IR di sektor ini belum merata karena sebagian besar perusahaan masih terbatas pada pengungkapan finansial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek nonkeuangan (Damajanti *et al.*, 2021). Posisi OJK menjadi sangat penting untuk diteliti karena lembaga ini berfungsi sebagai regulator dan pengawas utama seluruh aktivitas sektor keuangan di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi (Rosita & Baidlowi, 2025). Dengan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan memastikan tata kelola yang baik, OJK memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas penerapan prinsip pelaporan terintegrasi (Tanjung *et al.*, 2024).

Penerapan IR di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif. Berdasarkan laporan yang diinput oleh *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) dan

OJK di tahun 2020–2023, jumlah perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan dan mengadopsi prinsip IR meningkat dari sekitar 52 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 87 perusahaan pada tahun 2022, dengan dominasi berasal dari sektor perbankan dan manufaktur. Tetapi peningkatan tersebut belum diikuti oleh kualitas pengungkapan yang memadai (Selema *et al.*, 2024). Sebagian besar laporan masih bersifat simbolik (*symbolic disclosure*) dan belum mencerminkan integrasi strategis antara aspek keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola (Hendra, 2024). Fenomena ini mengindikasikan bahwa penerapan IR di Indonesia masih berada pada tahap transisi dari *compliance-pascabased reporting* menuju *value creation-based reporting*, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut mengenai determinan yang memengaruhi kualitas pelaporan tersebut, khususnya pada perusahaan keuangan yang diawasi oleh OJK (Pertiwi, 2022).

Pada sektor perbankan yang berada di bawah pengawasan OJK, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam implementasi IR. Laporan dari IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) menyebutkan bahwa sejumlah bank menerbitkan dokumen berjudul “*Integrated Annual Report*”, namun sebagian besar belum memenuhi kelengkapan elemen konten IIRC, sehingga belum benar-benar disebut sebagai laporan terintegrasi secara menyeluruh. OJK melalui surveilans perbankan (LSPI) dan laporan keuangan bank umum (2024), menyampaikan bahwa meskipun kredit berkelanjutan meningkat, kualitas pengungkapan terkait risiko lingkungan dan sosial masih lemah karena banyak bank melaporkan angka pembiayaan berkelanjutan,

tetapi tidak secara rinci menunjukkan dampak penggunaan dana terhadap lingkungan atau mitigasi yang dilakukan.

Masalah mengenai fenomena IR ini dapat diobservasi pada kasus Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), ketiganya merupakan bank besar yang berada di bawah pengawasan OJK. Bank Mandiri, meskipun memperoleh penghargaan *Annual Report Award* atas kualitas pengungkapan laporan keberlanjutannya, masih menghadapi kritik karena struktur laporan yang belum sepenuhnya mencerminkan integrasi antara kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam satu kerangka strategi jangka panjang. Beberapa bagian penting seperti *risks and opportunities* serta keterkaitan antara modal finansial dan modal manusia belum disajikan secara sistematis sesuai prinsip IR yang menekankan keterpaduan antar sumber daya dan strategi nilai (Maulana, 2023). BRI menunjukkan peningkatan dalam transparansi pelaporan, namun integrasi informasi keuangan dengan narasi nilai jangka panjang dan kinerja operasional masih terbatas, di mana laporan cenderung menitikberatkan pada hasil finansial tanpa menunjukkan hubungan sebab-akibat terhadap penciptaan nilai berkelanjutan (Oktavianus, 2025). Sementara itu, berdasarkan Laporan Sustainability Report BNI juga menghadapi tantangan serupa, di mana meskipun laporan ini mencerminkan komitmen keberlanjutan laporan integrasinya belum memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan antara kondisi keuangan, strategi bisnis, dan kapabilitas organisasi dalam menghadapi risiko serta peluang masa depan. Berikut tabel

mengenai perkembangan pelaporan IR untuk beberapa perusahaan perbankan yang diawasi OJK dari tahun 2021-2024:

Tabel 1. 1 Perkembangan pelaporan IR perusahaan perbankan

N O	Kode	Emiten (Bank)	2021	2022	2023	2024	Sumber/cata tan
1	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	Dilapork an (AR/SR)	Dilapor kan (AR/S R)	Dilapork an (SR)	Dilapork an (AR/SR)	IR/Investor Relations — dokumen PDF tersedia (sudah diverifikasi).
2	BBRI	PT Bank Rakyat Indone sia (Perser o) Tbk	Dilapork an (AR/SR)	Dilapor kan (AR/S R)	Dilapork an (SR)	Dilapork an (SR)	IR pages — dokumen tersedia.
3	BMRI	PT Bank Mandiri	Dilapork an (AR/SR)	Dilapor kan	Dilapork an (SR)	Dilapork an (SR)	IR pages — dokumen tersedia.

N O	Kode	Emiten (Bank)	2021	2022	2023	2024	Sumber/cata tan
4	BBNI	(Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia Tbk	Dilaporkan	Dilaporkan (AR/SR)	Dilaporkan	Dilaporkan	IR pages — dokumen tersedia.
5	BBTN	PT Bank Tabungan an Negara Tbk	Dilaporkan	Dilaporkan	Dilaporkan	Dilaporkan	IR pages — dokumen tersedia.

Sumber: Sustainability Report dan Annual Report Perusahaan Terkait tahun 2021-2022

Di sisi industri asuransi yang diawasi OJK, berbagai tantangan penerapan *integrated reporting* muncul secara terang terangan. Sebagai contoh, berdasarkan data praktek pelaporan keberlanjutan dan asuransi di Indonesia (2023) yang dikemukakan oleh Pratama Institute (2024), hanya sekitar 6% perusahaan asuransi yang menyusun laporan keberlanjutan terpisah dan mengikutsertakan assurance

eksternal, sedangkan sisanya 94% belum. Selain itu, dalam artikel yang dimuat di Bisnis.com (2025) disebutkan bahwa perusahaan asuransi umum menghadapi permasalahan akibat transisi ke PSAK 117, yang memerlukan penyesuaian aktuarial dan cadangan teknis secara signifikan, sehingga menghasilkan perubahan material pada neraca dan laba yang dapat mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kredibilitas laporan keuangan dan nonkeuangan. dalam artikel yang dimuat di Bisnis.com (2025),

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), adalah contoh nyata perusahaan yang menghadapi tantangan pelaporan terintegrasi di tengah penerapan PSAK 117. Menurut pengakuan pihak manajemen dalam artikel tersebut, transformasi ke standar baru ini menumbuhkan kebutuhan akan transparansi yang lebih tinggi dan pelaporan keuangan yang lebih kompleks dibanding sebelumnya, khususnya dalam pemisahan pendapatan dari kegiatan asuransi dengan pendapatan investasi serta penghitungan cadangan teknis actuarial. Berikut tabel mengenai perkembangan pelaporan IR untuk beberapa perusahaan asuransi yang diawasi oleh OJK dari tahun 2021-2024:

Tabel 1. 2 Perkembangan pelaporan IR perusahaan asuransi

N O	Kode	Emiten (Asuran si)	2021	2022	2023	2024	Sumber/cata tan
1	PNLF	PT Panin Financial Tbk (group, termasuk Panin Life)	Dilapor kan (AR/SR)	Dilapor kan (AR/SR	Dilapork an (SR)	Dilapork an (AR/SR)	IR/Investor Relations — dokumen tersedia (sudah diverifikasi).
2	SMMA	PT Sinar Mas Multiarth a Tbk (group; termasuk entitas asuransi)	Dilapor kan (AR inkl. SR)	Dilapor kan (AR inkl. SR)	Dilapork an	Dilapork an	IR/Investor Relations — dokumen tersedia (sudah diverifikasi).
3	ABDA	PT Asuransi	Dilapor kan	Dilapor kan	Dilapork an	Dilapork an	IR/Investor Relations —

N O	Kode	Emiten (Asuran si)	2021	2022	2023	2024	Sumber/cata tan
4	TUGU	Bina Dana Arta Tbk PT Asuransi Tugu Pratama Indonesi a Tbk	(AR/SR) Dilapor kan	(AR/SR) Dilapor kan	 Dilapork an	 Dilapork an	dokumen tersedia (sudah diverifikasi). IR/Investor Relations — dokumen tersedia (sudah diverifikasi).

Sumber: Sustainability Report dan Annual Report Perusahaan Terkait tahun 2021-2024

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi IR. De Laan *et al.* (2017) meneliti perusahaan di Afrika Selatan dan menemukan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, serta tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas IR. Penelitian ini menekankan bahwa faktor keuangan dan governance merupakan determinan utama dalam meningkatkan kualitas pelaporan, meskipun konteks Afrika Selatan berbeda karena IR sudah bersifat mandatory. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa adanya regulasi yang

mewajibkan penerapan IR mampu memperkuat hubungan antara faktor internal perusahaan dan kualitas laporan yang dihasilkan. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi IR tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh regulasi eksternal yang berlaku di suatu negara, sehingga membuka peluang untuk membandingkan hasil penelitian serupa pada konteks negara lain di mana IR masih bersifat *voluntary*, seperti di Indonesia.

Penelitian lain dilakukan oleh (Jamal & Ghani, 2006) terhadap perusahaan properti di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan IR. Perusahaan besar dan perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung melakukan pengungkapan lebih komprehensif sebagai sinyal untuk menjaga kepercayaan investor. Namun, penelitian ini terbatas pada satu sektor industri dan hanya menilai luas pengungkapan, bukan kualitas IR. Keterbatasan tersebut penting dicatat karena luas pengungkapan tidak selalu mencerminkan kedalaman informasi yang diberikan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan sejauh mana IR mampu memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selain itu, fokus pada sektor properti juga menimbulkan keterbatasan generalisasi, mengingat karakteristik risiko, struktur pendanaan, dan regulasi yang berlaku pada sektor tersebut berbeda dengan industri lain, sehingga diperlukan penelitian lanjutan lintas sektor dan dengan pengukuran kualitas IR yang lebih komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh García-Sánchez *et al.* (2013) meneliti perusahaan di Spanyol dan menemukan bahwa mekanisme tata kelola, seperti

ukuran dewan direksi dan proporsi komisaris independen, memengaruhi tingkat pengungkapan IR. Studi ini menyoroti pentingnya karakteristik dewan dalam meningkatkan transparansi, meskipun hasilnya masih beragam di berbagai konteks negara dan industri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran dewan bukan hanya sebatas fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong adopsi praktik pelaporan yang lebih akuntabel dan bernilai strategis. Namun demikian, variasi hasil antar negara menegaskan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola dalam memengaruhi kualitas IR dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sistem hukum, budaya organisasi, serta tingkat kepatuhan regulasi di masing-masing yurisdiksi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar bahwa tata kelola perusahaan merupakan faktor penting, tetapi masih memerlukan pengujian lebih lanjut untuk memahami perannya secara konsisten dalam konteks global.

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait implementasi IR di tingkat nasional. Putri Pertiwi *et al.* (2022) meneliti adopsi IR pada 322 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014–2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi IR di Indonesia masih dipengaruhi oleh tekanan isomorfik baik regulatif, normatif, maupun mimetic yang mendorong perusahaan untuk meniru praktik pelaporan yang dilakukan oleh entitas lain dalam industri yang sama. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa karakteristik perusahaan seperti ukuran dan eksposur industri berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan IR. Namun, meskipun terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang

mengadopsi IR, kualitas pengungkapan masih belum merata dan cenderung bersifat simbolik.

Damayanti dan Dewayanto (2023) meneliti determinan nonkeuangan terhadap kualitas *integrated reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, seperti efektivitas komite audit dan tingkat profitabilitas, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan IR. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun jumlah perusahaan yang melaporkan IR meningkat setiap tahunnya, masih terdapat kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara simbolik tanpa integrasi yang mendalam antara informasi keuangan dan nonkeuangan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan baik secara teoritis, empiris, maupun kontekstual. Penelitian internasional seperti yang dilakukan oleh De Laan *et al.* (2017), García-Sánchez *et al.* (2013), serta Jamal dan Ghani (2006) umumnya menekankan faktor profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan tata kelola sebagai determinan *integrated reporting* pada negara-negara dengan tingkat adopsi IR yang telah mapan atau bersifat mandatory. Dalam konteks tersebut, pengungkapan terintegrasi cenderung didorong oleh sistem regulasi yang sudah stabil dan tekanan pasar yang kuat. Dalam konteks Indonesia, khususnya pada sektor keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, implementasi *integrated reporting* masih berada pada tahap berkembang dan dalam banyak kasus masih bersifat simbolik. Penelitian oleh Putri

Pertiwi *et al.* (2022) serta Damayanti dan Dewayanto (2023) menunjukkan bahwa pengungkapan IR di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi antara aspek keuangan dan nonkeuangan, sehingga kualitasnya masih beragam antar perusahaan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menguji bagaimana kondisi *financial health* perusahaan memengaruhi kualitas *integrated reporting* dalam industri yang *highly regulated* seperti sektor keuangan masih sangat terbatas.

Secara teoritis, *Signaling Theory* menyatakan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat cenderung memberikan sinyal positif melalui pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan. Akan tetapi, dalam sektor keuangan yang diawasi ketat oleh regulator, pengungkapan dapat pula dipengaruhi oleh tekanan kepatuhan (*compliance pressure*), sehingga hubungan antara *financial health* dan kualitas *integrated reporting* menjadi tidak selalu linear atau konsisten. Dengan demikian, terdapat celah empiris terkait apakah perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih baik benar-benar menghasilkan kualitas IR yang lebih tinggi, ataukah pengungkapan tersebut lebih dipengaruhi oleh karakteristik internal dan tekanan regulasi. sebagian besar penelitian sebelumnya tidak secara spesifik memfokuskan objek pada perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, padahal sektor ini memiliki karakteristik risiko, tingkat pengawasan, serta tingkat kepercayaan publik yang berbeda dibanding sektor lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh *financial health* dan karakteristik perusahaan terhadap kualitas *integrated reporting* pada perusahaan perbankan dan

asuransi periode 2021–2024, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih kontekstual dan relevan bagi pengembangan literatur IR di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis (2020), yang mengkaji pengaruh *financial health* dan karakteristik perusahaan terhadap *integrated reporting*. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan dan tahun observasi yang dipilih. Jika penelitian Nurkholis berfokus pada sektor perusahaan secara umum yaitu 20 perusahaan BUMN, penelitian ini secara khusus mengarah pada 40 perusahaan sektor keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas 25 perusahaan perbankan dan 15 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024. Pemilihan jumlah dan komposisi tersebut mempertimbangkan proporsi perusahaan dalam sektor keuangan di BEI serta untuk menjaga representativitas dan keseimbangan data dalam analisis regresi panel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas *integrated reporting* pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik dan keberlangsungan sistem keuangan.

Pemilihan periode penelitian 2021–2024 dilakukan karena rentang waktu tersebut merepresentasikan fase transisi dan stabilisasi pascapandemi dalam perkembangan praktik pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*) di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan. Periode ini mencakup masa pemulihan ekonomi setelah tekanan pandemi COVID-19, di mana perusahaan mulai kembali pada kondisi

operasional yang lebih stabil serta menghadapi penguatan regulasi dan peningkatan ekspektasi transparansi dari regulator maupun investor. Dalam kurun waktu tersebut, perhatian terhadap isu keberlanjutan, tata kelola, dan integrasi informasi keuangan serta nonkeuangan semakin menguat, sejalan dengan meningkatnya dorongan penerapan pelaporan keberlanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan perkembangan standar global terkait sustainability reporting.

Berdasarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan keuangan selama 2021–2024, terlihat adanya peningkatan konsistensi, kedalaman pengungkapan, serta upaya integrasi informasi strategis dalam *integrated reporting*, sehingga periode ini dinilai lebih representatif untuk menilai bagaimana kondisi *financial health* dan karakteristik perusahaan berkontribusi terhadap kualitas pelaporan terintegrasi di Indonesia dalam konteks yang lebih aktual dan relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh *financial health* dan karakteristik perusahaan terhadap kualitas *integrated reporting* pada perusahaan keuangan yang mencakup perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta diawasi langsung oleh OJK. Sektor perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 huruf a. Melalui ketentuan tersebut, OJK mempunyai wewenang penuh atas pengaturan dan

pengawasan kelembagaan bank, mulai dari perizinan, kegiatan usaha, kepemilikan, hingga aspek tata kelola dan pelaporan.

Sedangkan untuk perusahaan asuransi, OJK mengatur dalam POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diatur bahwa laporan keuangan, pembentukan cadangan teknis, dan pemenuhan tingkat solvabilitas harus dilakukan oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi sejauh mana faktor - faktor internal perusahaan memengaruhi keterbukaan dan transparansi informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dengan mengarahkan fokus penelitian pada sektor keuangan, penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan literatur oleh para investor atau pihak yang membutuhkan mengenai hubungan antara kondisi finansial, tata kelola, dan kualitas pelaporan terintegrasi di sektor yang memiliki regulasi dan risiko tinggi.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengacu dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis (2020), yakni dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan. Pemilihan data sekunder ini didasarkan pada ketersediaannya yang terstandar, terverifikasi, serta dapat mencerminkan kondisi keuangan maupun praktik tata kelola perusahaan secara komprehensif. Dengan basis data tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran objektif

mengenai faktor-faktor internal yang memengaruhi kualitas *integrated reporting* pada perusahaan sektor keuangan yang diawasi OJK.

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel, sebagaimana juga diterapkan dalam penelitian Nurkholis (2020). Teknik ini dipandang relevan karena mampu menguji secara simultan dan parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hasilnya dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap kualitas *integrated reporting*. Pemilihan regresi berganda juga bertujuan untuk menghasilkan temuan empiris yang tidak hanya bersifat objektif dan terukur, tetapi juga dapat diuji kembali oleh peneliti lain. Dengan demikian, kesesuaian metode ini diharapkan mampu menjaga konsistensi penelitian sekaligus memperkuat validitas hasil yang diperoleh.

Harapan dari penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas *integrated reporting*, khususnya pada sektor keuangan yang diawasi OJK. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi regulator, auditor, dan pelaku industri keuangan dalam merancang strategi pelaporan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan akademik, tetapi juga relevan dalam mendukung peningkatan kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan baru mengenai hubungan antara kondisi kesehatan keuangan perusahaan (*financial*

health) dan karakteristik perusahaan terhadap kualitas *integrated reporting* pada sektor keuangan yang berada dalam lingkungan regulasi yang ketat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas pengujian *Signaling Theory* dalam konteks pelaporan terintegrasi pada industri yang *highly regulated*, khususnya perusahaan perbankan dan asuransi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya literatur empiris mengenai determinan kualitas *integrated reporting* di negara berkembang, khususnya Indonesia, dengan menggunakan periode observasi yang lebih mutakhir (2021–2024) serta fokus pada sektor keuangan yang memiliki karakteristik risiko, tingkat transparansi, dan pengawasan yang berbeda dibanding sektor lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *financial health* berpengaruh terhadap kualitas *integrated reporting* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kualitas *integrated reporting* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *financial health* terhadap kualitas *integrated reporting* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

2. Untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas *integrated reporting* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi, pelaporan korporasi, dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini memperkuat penerapan *Signaling Theory* dengan konteks empiris pada sektor keuangan di Indonesia, terutama pada perusahaan perbankan dan asuransi yang diawasi oleh OJK.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur mengenai faktor-faktor internal perusahaan, seperti *financial health* dan *company characteristics*, yang memengaruhi kualitas *Integrated Reporting* di industri yang sangat diatur (*highly regulated industry*).

Manfaat Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan
Penelitian ini diharapkan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan terintegrasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, khususnya di sektor perbankan dan asuransi yang memiliki tingkat pengawasan tinggi dari OJK.

2. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Diharapkan penelitian ini dapat membantu investor dan pemangku kepentingan sebagai sumber informasi yang dapat membantu dalam menilai kondisi keuangan dan kredibilitas perusahaan melalui kualitas *Integrated Reporting*, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional.

3. Bagi Regulator (OJK dan BEI)

Penelitian ini diharapkan membantu sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas regulasi pelaporan dan pengawasan pada sektor keuangan, khususnya dalam mendorong penerapan pelaporan terintegrasi yang transparan, relevan, dan bernilai tambah bagi publik.